

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)  
DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Achmad Suharyo, Sukismanto Aji, Christopan Deswansyah

**ABSTRACT**

The objective of this study is to investigate the public accountability of the online procurement of good and services at Lampung Government. This study uses dimensions of transparency, liability, control, responsibility, and responsivity. Object of this research is the procurement of goods and services electronically at the LPSE and ULP Unit of the Lampung Provincial Government. This type of research is a case study. This research uses a qualitative approach. The research data were obtained through interviews, observation, and documentation study. The results showed that public accountability with the application of E-Procurement in Lampung Province in the aspect of achieving goals, generally has been going well and has a significant effect on changes in the process of procuring goods / services. The process of procuring goods / services is more efficient, effective, open and competitive, transparent, fair / non-discriminatory, and accountable.

Keywords: public accountability, e-procurement, good and services.

**A. PENDAHULUAN**

Perubahan budaya kerja terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya dengan memberikan pelayanan yang terbuka sehingga setiap warga mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses informasi. Pemprov Lampung memanfaatkan teknologi dalam upaya meningkatkan kinerja. Kemajuan teknologi informasi dianggap sebagai salah satu jalan keluar dalam upaya perubahan budaya kerja yang lebih baik. *E-Procurement* yang merupakan imbas dari kemajuan teknologi diharapkan akan mampu menjadi instrumen untuk memecahkan problema pengadaan barang/jasa public. *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya KKN dalam pengadaan barang/jasa. Namun, implementasi *e-Procurement* di Indonesia ini belum berjalan maksimal.

Bappenas (2019) mencatat ada berbagai sebab, yaitu: Komitmen atau political will dari pimpinan teratas belum maksimal diberikan dalam mendukung keberhasilan penerapan *e-Procurement*, kesiapan sarana dan prasarana teknologi *e-Procurement* masih belum memadai, lemahnya pengawasan terhadap implementasi *e-Procurement* dapat terjadi karena pemahaman sistem dan prosedur pengadaan yang kurang baik, kapasitas pelaksanaan dilapangan belum memadai, dan tidak transparannya proses tender, Keterbukaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan setiap SKPD masih dijalankan dengan setengah-setengah, dan persoalan pengadaan barang/jasa juga muncul karena para rekanan/vendor

belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka. Dari pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tujuan dan dimensi-dimensi akuntabilitas publik penerapan *E-procurement* pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Provinsi Lampung.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam konteks organisasi pemerintah akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik yang seharusnya dibangun adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja) tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Mekanisme akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk mengukur kinerja, tetapi juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik agar sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.

Koppell (2005) dalam bukunya *Pathologies of Accountability*, seperti yang dikutip oleh Krina (2013) dalam bukunya Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, menjelaskan bahwa untuk memahami konsep akuntabilitas dengan baik maka perlu diketahui apa saja dimensi-dimensinya. Koppel menyebutkan lima dimensi akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Teori akuntabilitas dari Koppel inilah yang akan menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas penerapan *E-procurement* Pemprov Lampung

Secara umum *e-Procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik (Oliviera, 2001:43) *e-Procurement* dalam pengertian umum diterapkan pada sistem *data base* yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (Croom & Brandon-Jones, 2005:369).

## **C. METODOLOGI**

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis kualitatif, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif

analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Objek penelitian ini, yakni berkaitan dengan pelaksanaan *e-Procurement* di Pemprov Lampung dengan menggunakan sampel yang telah ditentukan (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data adalah dengan triangulasi data yang digunakan untuk saling melengkapi di dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pencapaian Tujuan Penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Lampung.**

Dalam aspek efisiensi waktu ini, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* dapat dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan pengadaan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya telah terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih sedikit dibanding apabila pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan metode konvensional atau manual. Dalam konteks ini, maka tujuan efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan *e-procurement* di Pemprov Lampung telah dapat tercapai dengan efisiensi penggunaan hari kalender; bukan sekedar hari kerja sebagaimana dilakukan dalam metode manual atau konvensional.

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan dana dan fasilitas yang secukupnya dalam pelaksanaan pengadaan berbagai barang dan dalam jangka waktu yang singkat bisa mengurangi pengeluaran biaya yang dikeluarkan baik oleh penyedia maupun LPSE. Dokumen yang tadinya dilakukan secara manual membutuhkan banyak kertas dan biaya. Dengan adanya teknik elektronik penghematan biaya penyiapan dokumen secara manual bisa ditekan.

Dalam aspek efisiensi hasil proses pengadaan barang/jasa melalui *eprocurement* di Pemprov Lampung perlu dianalisis dengan menggunakan indikator selisih antara nilai kontrak dengan pagu/HPS dalam setiap paket pekerjaan yang dilelangkan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah terdapat selisih yang lebih tinggi antara HPS dan nilai kontrak dalam pelaksanaan *e-procurement* di Pemprov Lampung atau sebaliknya. Masalah yang juga muncul dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemprov Lampung adalah keharusan Unit Layanan Pengadaan untuk memilih harga terendah. Hal tersebut membuat peserta pelelangan cenderung banting harga,

pengadaan barang/jasa yang bersifat sulit diukur (*intangible*) pada beberapa indikator penilaian yang subyektif, besarnya sorotan publik sehingga menimbulkan efek takut pada sebagian personil Unit Layanan Pengadaan, serta masih adanya komitmen pemimpin (pada level pusat) yang rendah dalam melaksanakan *e-procurement* terutama dalam aspek perlindungan hukum.

Perluasan akses pasar dan persaingan yang sehat juga merupakan solusi strategis untuk menghapuskan segmentasi kewilayahan dan mewujudkan satu pasar nasional pengadaan. Selama ini pasar pengadaan pemerintah masih terfokus dimana hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mendapat akses ke pasar pengadaan.

Terjadi perubahan budaya kerja, yaitu Cara komunikasi beralih dari sistem konvensional menjadi online, Penandatanganan dilakukan secara elektronik, Penerapan/pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih dominan, dan Terjadi penataan peran dan tanggung jawab secara jelas

## **2. Analisis Dimensi-Dimensi Akuntabilitas Publik di dalam Penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Lampung**

Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung telah mampu memberikan informasi pengadaan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara terbuka. Reward dan punishment bagi Pegawai yang terlibat telah di terapkan berdasarkan SOP dan peraturan yang ada dibawah paying hukum. Teknologi *e-Procurement* memberikan mekanisme kontrol dan pengaduan atas dugaan penyimpangan pada suatu proses pengadaan. Transparansi dan keterbukaan proses pengadaan tentunya akan semakin memudahkan proses pengawasan. Seluruh elemen masyarakat terutama lembaga non-pemerintah diharapkan dapat berperan secara aktif dalam mengawasi proses pengadaan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Panitia pengadaan wajib memiliki sertifikasi kompetensi dan tupoksi masing- masing pegawai harus jelas dan dipertegas. Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung belum maksimal di dalam menerapkan “Pengadaan Publik yang Berkelanjutan”. Lembaga pengadaan (BPBJ dan LPSE) hanya berorientasi pada aspek kepentingan ekonomi saja. Itupun hanya sebatas mempercepat proses lelang/tender. Responsivitas dalam pengadaan barang/jasa belum maksimal melihat keinginan dan kesiapan para pelaku pengadaan untuk memberikan maksimal apa yang diinginkan oleh public.

**Tabel Matriks penjabaran sebelum dan sesudah *e-Procurement* diterapkan di Provinsi Lampung**

NO	Aspek	Kondisi Sebelum e-Procurement	Kondisi Setelah e-Procurement
1.	Efektivitas dan Efisiensi	Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak berkualitas bahkan terjadi inefisiensi.	Penghematan uang dan penyederhanaan keseluruhan proses.
2.	Akses Pasar dan persaingan Usaha	Pengadaan barang/jasa melalui cara konvensional telah menimbulkan berbagai masalah dan penyelewengan sehingga tidak berjalan dengan sehat dan sangat jauh dari prinsip-prinsip efisien, efektif, non-diskriminatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance	e-Procurement memiliki banyak keunggulan dibanding dengan pengadaan konvensional yaitu : tanpa pembatas, jangkauan luas, semua orang setara, cepat, transparan, aman (dengan proses penyandian) dan semua proses terkendali dan terdokumentasi
3.	Perubahan Budaya Kerja	Budaya kerja pengadaan barang/jasa merupakan budaya manual. Seluruh proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara komunikasi beralih dari sistem konvensional menjadi online</li> <li>2. Penandatanganan dilakukan secara elektronik</li> <li>3. Penerapan/pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih dominan</li> <li>4. Terjadi penataan peran dan tanggung jawab secara jelas</li> </ol>
4.	Transparansi	Birokrasi berbelit, banyaknya pengaduan dan sanggahan	Telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses data/ informasi pengadaan barang dan jasa
5.	Dimensi Liabilitas	Panitia Pengadaan melakukan praktek-praktek persekongkolan.	Telah meningkatkan kinerja administrator e-procurement
6.	Dimensi Kontrol	Potensi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa bisa terjadi kapan saja mulai di dalam proses perencanaan pengadaan, pembentukan panitia/pejabat pengadaan, penyusunan dan penetapan HPS, penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang	Telah memberikan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang cukup baik dari pimpinan kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa

NO	Aspek	Kondisi Sebelum e-Procurement	Kondisi Setelah e-Procurement
		dan jasa, pengumuman pelelangan, hingga kepada pengumuman pemenang	
7.	Dimensi Responsibilitas	Panitia pengadaan kebanyakan belum memiliki sertifikat kompetensi	Panitia/ pejabat pengadaan sudah memiliki standar profesionalisme dan kompetensi yang cukup baik
8.	Responsivitas	Pasar pengadaan masih tersegmentasi di kelompok-kelompok tertentu, dan begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam proses pengadaan yang berakibat bahwa kemanfaatan pengadaan barang/jasa publik (value for money) masih jauh dari harapan publik	Mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat/ public di provinsi Lampung

## E. KESIMPULAN

Pelaksanaan e-procurement di Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan cukup efektif dan efisien, mampu meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, dan mampu mempengaruhi budaya kerja aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pencapaian akuntabilitas publik penerapan e-Procurement di Pemerintah Provinsi Lampung, secara umum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari dimensi transparan, bahwa dengan e-Procurement telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses data/informasi pengadaan barang/jasa. Pada dimensi liabilitas, bahwa dengan e-Procurement telah meningkatkan kinerja administrator e-Procurement yakni bagi SDM di LPSE dan BPBJ. Pada dimensi kontrol, bahwa dengan e- Procurement telah memberikan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang cukup baik dari pimpinan kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada dimensi responsibilitas, bahwa panitia/pejabat pengadaan sudah memiliki standar profesionalisme dan kompetensi yang cukup baik. Pada dimensi responsivitas, bahwa dengan e-Procurement belum maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Herman, Joffri. 2015. Akuntabilitas Publik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Toraja Utara. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

- Koppel, J. GS. 2005, *Pathologies of Accountability : ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder*, Public Administration Review, Vol.65 No.1.
- Sani, Asrul. 2011. *Evaluasi Penerapan e-Procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tarmizi, Rosmiaty., Selvyana, Margaretha., Purnomo, Agus., 2010. Pengendalian Biaya dalam Hubungannya dengan Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus pada Hotel Indra Puri di Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(1). 95-108.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Insan Cendekiawan: Surabaya